

**ANALISIS FINANSIAL USAHA PENANGKAPAN IKAN DALAM  
MODEL PERBAIKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN  
ROKAN HILIR PROVINSI RIAU <sup>(1)</sup>**

*(FINANCIAL ANALYSIS OF OF FISHING EFFORT IN A MODEL OF FISHERMEN  
PROSPERITY IMPROVEMENT AT THE REGENCY OF ROKAN HILIR RIAU PROVINCE<sup>(1)</sup>)*

**M.Yafiz <sup>(2)</sup>, M.Fedi A. Sondita<sup>(3)</sup>, Soepanto Soemakaryo<sup>(3)</sup>, Daniel R.  
Monintja<sup>(3)</sup>**

Diterima : 30 Februari 2009    Disetujui : 28 Mei 2009

**ABSTRACT**

The Regency of Rokan Hilir has huge potential of offshore fishing resources in a very strategic position in Malacca Strait. In order to gain a maximum benefit for the wealth of the fishermen, strategic mechanism of management is a necessity. The specific strategy should be based on holistic and comprehensive model. So, to develop the model, information on offshore financial fishing performance is required. This research is aimed to measure financial indicators of eight kinds of offshore fishing methods, that are dominant in 4 districts in the Regency of Rokan Hilir, Riau Province, ie.: Sinaboi, Bangko, Kubu, and Pasir Limau Kapas. Data is collected from survey of 2.447 units of offshore fishing unit. Financial Analysis of activities are measured using indicators: NPV, RTO, RTL, ROI dan PP. From 8 kinds of offshore fishing methods, Five kinds are considered to be feasible. Those five kinds of methods are payang, bubu, pengumpul kerang, jaring insang hanyut and handline; the rest, that are not feasible are jaring insang lingkar, pukot udang dan pukot pantai. Offshore fishing methods using jaring insang hanyut could be prioritized to be developed in this regency because it provided the highest income for the fishermen (NPV=56.432,719), the most productive (B/C ratio=2,00), highest investment benefit (IRR=57,53%), highest return of investment (ROI=7,01) and the shortest payback period (PP=0,14). The application of Aplikasi development activities indeed has to consider the total income of every single individual involved on the activities, not only the income of the owner of the unit activities. In general, government incentive in several format of subsidies for fishermen using the beneficial methods of offshore fishing.

***Key word:*** *The level of wealth, financial analysis, financial Indicators, feasibility*

## PENDAHULUAN

Pembangunan sektor perikanan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tiga komponen penting tujuan pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), perluasan lapangan kerja (*pro job*) dan penurunan tingkat kemiskinan (*pro poor*). Namun, sampai saat ini pembangunan perikanan tersebut belum secara signifikan memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi pembangunan nasional tersebut (Setiawan, 2007).

Hal serupa dinyatakan Dahuri (2004) dalam Setiawan (2007) bahwa sumbangan sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan 20,06% dari pendapatan domestik bruto (PDB) tahun 1998. Khusus subsektor perikanan pada tahun 2004 menyumbang 15,0% PDB sektor pertanian berdasarkan harga konstan tahun 2000 (BPS, 2004). Saat bersamaan China dan Korea, dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih kecil, menyumbang PDB masing-masing sebesar 48,4% dan 54,0%. Departemen Kelautan dan Perikanan (2004) melaporkan bahwa sebanyak 3,91 juta KK atau 16,42 juta jiwa di antara 8.090 desa pesisir di Indonesia tergolong sebagai penduduk miskin dengan *Poverty Headcount Index* sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan belum berdampak secara optimal terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan nelayan ini sangat berkaitan dengan kondisi sumberdaya perikanan, kualitas sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan fasilitas akses terhadap modal, teknologi dan pasar.

Gambaran serupa terjadi pada kehidupan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kabupaten ini berpenduduk 551.402 jiwa dengan penduduk miskin 124.016 jiwa dalam 28.042 rumahtangga. Hampir setengah dari penduduk miskin tersebut (48% atau 59.528 jiwa) adalah masyarakat nelayan yang berada di empat kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Bangko, Kubu, Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki pendapatan pada kategori Rp 250.000.- s/d Rp 750.000.- per bulan. Kondisi ini sangat ironis karena kabupaten ini mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang potensial untuk dimanfaatkan dan posisi strategis di Selat Malaka. Produk perikanan dari kabupaten ini memiliki potensi ekspor yang besar ke Malaysia dan Singapura. Hingga saat ini belum diketahui dengan persis unit usaha penangkapan ikan apa yang layak tetap dikembangkan.

Penyebab utama tidak berkembangnya usaha perikanan di Kabupaten Rokan Hilir adalah terbatasnya sarana dan prasarana perikanan, rendahnya kualitas sumber daya manusia lemahnya akses terhadap modal dan pasar, belum adanya kebijakan publik yang berpihak kepada nelayan (terutama nelayan kecil), dan belum kondusifnya faktor-faktor pendukung industri perikanan yang berorientasi ekspor. Salah satu cara untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan perikanan yang tepat adalah membuat suatu model perbaikan kesejahteraan nelayan yang bersifat holistik dan komprehensif menggunakan *structural equation modeling* (SEM) yaitu metode analisis yang menggunakan pendekatan terintegrasi antara Analisis Faktor yang saling berpengaruh (Ghozali, 2006), pengujian model untuk melihat hubungan antar variabel laten, dan mendapatkan model yang bermanfaat untuk prediksi (Mueller, 1996). Cakupan model tersebut adalah hasil kajian interaksi berbagai faktor/komponen yang dapat memperbaiki kesejahteraan nelayan, yaitu lingkungan usaha perikanan (LU) yang terdiri dari lingkungan internal (LINT), lingkungan eksternal (LEX), dan lingkungan industri (LIN), kegiatan perikanan tangkap (TKP),

kegiatan perikanan budidaya (BDY), kegiatan pengolahan hasil perikanan/*processing* (PROS), kewenangan Pemerintah Pusat (KP), kewenangan Pemerintah Daerah (KOT), dan kesejahteraan nelayan (KN).

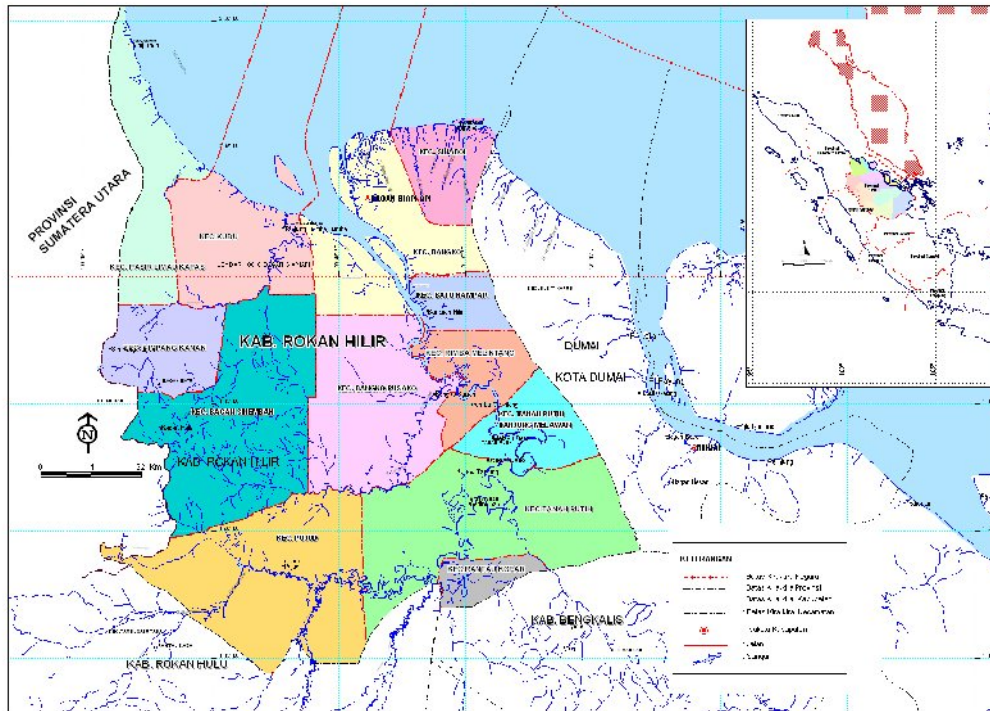
Makalah ini menyajikan salah satu hasil analisis terhadap delapan jenis usaha penangkapan ikan yang ada di empat kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, ditinjau dari kelayakan finansial usaha penangkapan ikan dengan menghitung indikator finansial dari masing-masing usaha. Hasil analisis ini merupakan informasi penting untuk menyusun model tersebut, mengingat kelayakan usaha adalah salah satu faktor kunci keberlanjutan usaha penangkapan ikan.

Penelitian ini bertujuan mengukur indikator finansial delapan jenis usaha penangkapan ikan pada 4 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Daerah penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan lokasi pengambilan data di empat kecamatan pesisir, yaitu Sinaboi, Bangko, Kubu, dan Pasir Limau Kapas (Gambar 1). Keempat kecamatan tersebut dipilih karena berada di kawasan pesisir dan lebih dari 90% penduduknya adalah nelayan, kecuali Kecamatan Bangko (30%).



Gambar Lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hilir

### Metode Pengumpulan Data

Data dihimpun melalui survei lapangan dan studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran berbagai referensi, buku dan laporan yang relevan dengan bahan penelitian. Data yang dikumpulkan antara lain: jumlah nelayan berdasarkan jenis dan kelas usahanya, jumlah dan jenis usaha penangkapan ikan, dan jumlah produksi perikanan tangkap serta faktor-faktor yang menentukan penghasilan nelayan, seperti modal, harga ikan, hasil tangkapan, biaya operasi dan sebagainya. Untuk penelitian ini, data tentang usaha perikanan diperoleh dari 2.447 unit populasi usaha Penangkapan ikan, dengan sampel berjumlah 148 penangkapan ikan (12 unit payang,

48 unit bubu, 6 unit pengumpul kerang, 52 unit jaring insang hanyut, 5 unit jaring insang lingkaran, 11 unit *handline*, 10 unit pukat udang dan 6 unit pukat pantai).

### Analisis Finansial Usaha Perikanan

Analisis finansial usaha dilakukan untuk mengukur kinerja usaha penangkapan ikan dengan menerapkan metode yang dipakai Djamin (1993), Simanjuntak (1997), Sugiyono (2001), yaitu menghitung nilai-nilai NPV (*net present value*), NB/C (*net benefit cost ratio*), IRR (*internal rate of return*), ROI (*return of investment*), dan PP (*payback period*). Berikut adalah penjelasan singkat tentang cara penghitungan indikator finansial tersebut:

- (1) NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari pengeluaran pada tingkat bunga tertentu, yang dinyatakan dengan rumus :

$$NPV = \sum_t^n \frac{Bt - Ct}{(1+i)^t} \geq 0$$

- (2) NB/C Ratio adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif, dinyatakan dengan rumus;

$$\frac{B}{C} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{Bt}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{Ct}{(1+i)^t}}$$

- (3) IRR adalah tingkat discount (*discount rate / interest rate*) pada saat NPV = 0. Suatu investasi dapat dikatakan layak apabila IRR lebih besar dari nilai *interest rate* yang ditentukan, semakin tinggi nilai IRR maka investasi akan semakin layak (*feasible*). IRR dihitung dengan rumus;

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)} (i_2 - i_1)$$

- (4) ROI yaitu untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi dari benefit (pendapatan)

yang diterima pemilik, dihitung dengan rumus;

$$ROI = \frac{Benefit}{Investasi}$$

- (5) PP yaitu untuk mengetahui lamanya pengembalian investasi dari benefit (pendapatan) yang diterima, dihitung dengan rumus;

$$PP = \frac{Investasi}{Benefit}$$

### HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibu Kota Bangansiapiapi mempunyai luas wilayah sekitar 888.159 hektar, berada pada koordinat 1°14-2°45 LU dan 100°17-101°21 BT. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas 13 kecamatan dan 83 desa yang menyebar di sepanjang pesisir dan areal perkebunan di wilayah Barat Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir di sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu, di sebelah barat dengan Kabupaten

Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara) dan di sebelah utara dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Bagansiapiapi juga merupakan pusat kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau.

Beberapa kota kecil yang banyak didiami nelayan di Kabupaten Rokan Hilir seperti Panipahan, Pulau Halang dan Sinabol merupakan penghasil ikan laut penting dan menjadi pemasok utama ke Bagansiapiapi sebelum diekspor dan memenuhi kebutuhan lokal Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar hasil perikanan tersebut diekspor ke Malaysia dan Singapura. Produk utama perikanan Rokan Hilir adalah ikan segar, ikan kering, ikan asin, udang, terasi, dan lain-lain.

### **Jenis Usaha Penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hilir**

Jenis usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dapat dikelompokkan menurut jenis alat tangkap yang digunakan yaitu, payang, bubu, pengumpul kerang, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, *hand line*, pukot udang, pukot pantai. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi yang dapat diandalkan untuk mendukung pasar domestik maupun ekspor (Tabel 1). Salah satu faktor pendukung pengembangan investasi di Kabupaten Rokan Hilir adalah kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka, sehingga menjadi peluang investasi berskala internasional (ekspor), berupa industri perikanan tangkap (ikan segar ekspor), industri pengalengan ikan, dan industri pakan untuk budidaya, dan ikan laut lainnya.

**Tabel 1. Produksi perikanan tangkap menurut jenis alat tangkap di Kabupaten Rokan Hilir**

Tahun	Produksi (ton)							
	Payang	Bubu	Pengumpul l Kerang	Jaring Insang hanyut	Jaring Insang Lingkar	Hand Line	Pukat Udang	Pukat Pantai
2004	1.037,0	201,0	103,0	1.325,2	405,6	453,4	96,5	205,7
2005	1.200,3	194,4	293,4	1.549,6	945,8	503,6	102,6	177,5
2006	1.500,5	765,5	299,2	1.674,5	1.032,9	512,6	174,4	275,5
2007	1.734,4	867,3	302,5	1.895,8	1.005,5	612,6	117,3	298,3
2008	2.002,5	765,3	365,7	2.010,7	1.324,8	702,1	120,6	287,6

Sumber : Dinas Perikanan dan kelautan kabupaten Rokan Hilir 2009

### Kelayakan finansial usaha penangkapan ikan

Kebutuhan modal, produksi, pendapatan, biaya operasonal, dan keuntungan bersih usaha

penangkapan ikan berbeda di antara jenis-jenis usaha yang diteliti, seperti yang disajikan pada (Tabel 2).

**Tabel 2. Rata-rata modal, produksi, penerimaan, biaya operasi, dan keuntungan bersih dari 8 jenis usaha penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Usaha penangkapan Ikan	Modal Rata-Rata (Rp 000)	Produksi (Ton)	Penerimaan (Rp 000)	Biaya Operasi (Rp 000)	Keuntungan Bersih (Rp 000)
1	Payang	24.000	2.002,5	29.898	14.017	15.881
2	Bubu	9.200	765,3	11.174	5.357	5.816
3	Pengumpul Kerang	4.400	365,7	5.455	2.559	2.895
4	Jaring Insang Hanyut	24.100	2.010,7	33.827	14.073	19.748
5	Jaring Insang Lingkar	23.800	1.324,8	18.858	13.689	5.168
6	Handkine	8.400	702,1	8.609	234.00	
7	Pukat Udang	4.100	120,6	2.445	259	8.375
8	Pukat Pantai	7.500	287,6	3.3823	15.194	846
						(10.216)

Sumber : Data analisis data lapang 2009

Hasil analisis finansial usaha penangkapan ikan dapat memberikan

data kuantitatif kondisi sebagai cerminan dari tingkat kesejahteraan

mereka. Lima di antara delapan jenis usaha penangkapan ikan yang dianalisis memiliki kinerja usaha yang baik sehingga layak untuk dikembangkan lebih lanjut (Tabel 3). Kelima jenis usaha tersebut adalah usaha perikanan payang, bubu,

pengumpul kerang, jaring insang hanyut dan *hand line*. Sisanya, yaitu usaha perikanan jaring insang lingkaran, pukot udang, dan pukot pantai tergolong tidak layak dikembangkan

**Tabel 3. Indikator finansial usaha perikanan di 4 kecamatan Kabupaten Rokan Hilir**

Jenis	Hasil Analisis Kelayakan Finansial					Kesimpulan
	NPVi (Rp)	B/C	IRR	ROI	PP	
Payang	40.373.888	1,78	41,21%	6,22	0,16	Layak
Bubu	13.285.451	1,74	30,80%	6,08	0,16	Layak
Pengumpul Kerang	7.228.433	1,78	38,17%	6,22	0,16	Layak
Jaring Insang Hanyut	56.432.719	2,00	57,53%	7,01	0,14	Layak
Jaring Insang Lingkaran	(1.355.926)	1,15	7,58%	3,95	0,25	Tidak Layak
<i>Handline</i>	17.065.181	1,89	51,38%	6,61	0,15	Layak
Pukat Udang	(496.077)	1,10	5,60%	2,98	0,34	Tidak Layak
Pukat Pantai	(1.802.032)	1,04	2,70%	3,33	0,30	Tidak Layak

Sumber : Hasil analisis data lapang 2009

Usaha penangkapan ikan jaring insang hanyut, merupakan usaha penangkapan ikan yang paling layak untuk dikembangkan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan indikator finansial, yaitu NPV sebesar Rp 56.432.719,-. artinya usaha ini dapat menghasilkan nilai bersih setelah di *discount* dengan tingkat bunga deposito yang berlaku (8,65%) sebesar angka tersebut dalam satu periode pengoperasiannya (umur teknis alat). Dari indikator NB/C, yaitu indikator yang merupakan perbandingan antara

keuntungan bersih yang dihasilkan dengan biaya operasi.

Usaha Penangkapan ikan Jaring Insang Hanyut menghasilkan B/C sebesar 2, artinya usaha Penangkapan ikan ini menghasilkan benefit/ keuntungan 2 kali dari biaya yang dikeluarkan. IRR dari usaha Penangkapan ikan Jaring Insang Hanyut sebesar 57,53%, artinya tingkat pengembalian internal dari usaha penangkapan ikan Jaring Insang Hanyut menghasilkan keuntungan diatas tingkat bunga yang berlaku. ROI, usaha



penangkapan ikan Jaring Insang hanyut sebesar 7,01 adalah kemampuan usaha penangkapan ikan ini laba dari investasinya. Nilai PP sebesar 0,14 paling kecil dari delapan usaha penangkapan ikan lainnya, menandakan tingkat pengembalian investasi dari usaha perikanan ini adalah paling cepat. Secara berturut-turut tingkat kelayakan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hilir setelah usaha penangkapan Ikan jaring insang hanyut adalah payang, *hand line*, bubu, dan usaha penangkapan ikan pengumpul kerang. Sedangkan tiga jenis usaha penangkapan ikan lainnya yaitu jaring insang lingkaran, pukot udang dan pukot pantai tidak layak dikembangkan berdasarkan indikator finansial. Ketiga usaha penangkapan ikan ini mempunyai NPV yang negatif, NB/C nya kecil, IRR dibawah suku bunga yang diharapkan (lebih kecil dari 8,65%), ROI kecil serta PP yang relatif lebih lama.

Meskipun usaha penangkapan ikan yang tidak layak dikembangkan hanya tiga dari delapan jenis usaha perikanan yang ada, tetapi karena sebagian besar nelayan terkonsentrasi menjalankan usaha perikanan ini (terutama jaring insang lingkaran dan pukot pantai), maka secara keseluruhan hal ini sangat berpengaruh dan berdampak

pada rendahnya kesejahteraan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Pilihan nelayan terhadap ketiga jenis unit penangkapan yang tidak layak ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan modal yang dimiliki, keterampilan sebagian besar nelayan, kebiasaan atau budaya yang turun temurun dan pertimbangan taktis nelayan dalam melaut. Akses terhadap permodalan merupakan masalah utama bagi nelayan setempat, karena lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi dan lembaga sejenis lainnya masih enggan bermitra dengan mereka karena masih adanya paradigma bahwa berbisnis atau bermitra dengan nelayan mengandung risiko yang tinggi.

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan modalnya nelayan menggunakan jasa pelepas uang atau rentenir yang secara jangka panjang akan menimbulkan kesulitan baru bagi nelayan. Hasil penelitian Campbell (2000) tentang konsep kerangka mata pencaharian yang berkelanjutan (*the sustainable livelihoods framework*) menyebutkan bahwa untuk membangun mata pencaharian yang berkelanjutan, perlu diperhatikan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat pesisir (nelayan), diantaranya (1) *human assets*, meliputi pengetahuan, kecakapan dan kemampuan; (2) *natural assets*, aset sumberdaya yang

ada disekitarnya; (3) *social assets*, dukungan yang di dapat dari masyarakat sekitar dan keluarga; (4) *physical assets*, infrastruktur yang dapat dimanfaatkan seperti jalan, suplai air bersih, pelabuhan dan sebagainya; serta (5) *financial assets*, modal yang dapat diperoleh untuk aktivitas usaha yang dijalankan. Berdasarkan Campbell (2000), maka aset yang belum dimiliki oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Rokan Hilir adalah *financial assets*.

Demikian pula dengan keterampilan nelayan yang sangat terbatas yang hanya mengandalkan kemampuan yang didapat secara turun-temurun, sehingga akan menyulitkan sebagian besar nelayan untuk beralih pada usaha perikanan lainnya. Nelayan juga terkadang terlalu taktis dan berfikir sederhana. Hal ini terlihat dari kebiasaannya untuk lebih memilih bekerja di kapal orang dengan upah yang seadanya atau memilih menyusuri pantai walaupun hasilnya tidak jelas daripada harus melaut lebih ke tengah. Akibatnya nelayan hanya mampu dan puas untuk mencukupi kebutuhannya sendiri seadanya (bersifat *subsistant*).

Bila kondisi ini tidak bisa diubah dan usaha perikanan yang lebih layak secara finansial tidak bisa dikembangkan di lokasi, maka kesejahteraan nelayan setempat akan semakin terpuruk. Panayotou (1992) mengatakan bahwa nelayan tetap

mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Panayotou ini ditekankan oleh Subade dan Abdullah (1993) bahwa nelayan lebih puas hidup dari menangkap ikan daripada sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena prinsip yang demikian, maka apapun yang terjadi dengan keadaannya tidak dianggap sebagai masalah bagi mereka. Karena itu meskipun menurut pandangan orang lain hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupannya.

Angka indikator analisis finansial usaha perikanan di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, tentunya akan dapat dijadikan salah satu landasan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Terhadap usaha penangkapan ikan yang indikator finansialnya tidak layak tentunya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, agar tidak mengusahakan usaha penangkapan ikan tersebut. Selanjutnya untuk usaha-usaha penangkapan ikan yang memang secara finansial layak untuk dikembangkan, perlu terus didorong karena usaha ini akan memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- 1) Di antara delapan jenis usaha penangkapan ikan, lima di antaranya secara finansial memiliki kelayakan usaha. Kelima jenis usaha tersebut adalah usaha perikanan payang, bubu, pengumpul kerang, jaring insang hanyut dan hand line; tiga jenis usaha yang tidak menguntungkan adalah usaha-usaha jaring insang lingkaran, pukat udang dan pukat pantai.

### Saran

- 1) Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perlu mempertimbangkan angka indikator finansial usaha penangkapan ikan, sehingga tujuan kebijakan meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin dapat tercapai. Pengalihan jenis usaha perikanan dari yang tidak layak kepada yang layak perlu disertai dengan solusi terhadap akses modal, teknologi dan peningkatan keterampilan.
- 2) Usaha perikanan tangkap jaring insang lingkaran, pukat udang dan pukat pantai di Kabupaten Rokan Hilir perlu dibatasi karena secara finansial tidak layak karena itu tidak dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pelaksanaan pembatasan alat tersebut diperlukan sosialisasi untuk penyadaran masyarakat nelayan yang secara turun temurun menggunakan alat

tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan pengkajian tentang penggantian alat tangkap pukat udang, mengingat potensinya cukup tersedia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, J. 2000. *Sustainable Coastal Livelihoods Research in the Bay of Benga*. Sustainable Coastal Livelihoods Newsletter. Volume 1, Issue 1. IMM Ltd. 1 Southern hay West. UK.
- Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Masyarakat, LISPI dan Ditjen P3K. Jakarta. 145 halaman.
- \_\_\_\_\_. 2001. Kebijakan Program Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Menuju Bangsa Indonesia yang Baru. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dahuri. R., J. Rais., S.P. Ginting, M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2006. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang usaha perikanan tangkap. Jakarta, 2006.
- dengan *Partial Least Square* (PLS). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 214 hal.
- Djamin, Zulkarnain, 1993. Perencanaan dan Analisis Proyek. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gray, C.; P. Simanjuntak; L.K. Sabur; P.F.L. Maspaitella dan R.C.G. Varley, 1997. Pengantar Evaluasi Proyek. Edisi Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Downey, W.D. dan S.P. Erickson, 1992. Manajemen Agribisnis. Edisi Kedua. Erlangga, Jakarta.
- Mueller R O 1996. Basic Principles of Structural Equation Modeling: An Introduction to LISREL and EQS. New York
- Ghozali I 2006. *Structural Equation Modeling* Metode Alternatif